

**SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA KHALIFAH ALI BIN ABI
THALIB DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

ZAINUDIN

NPM : 1321020030



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

**ANALISIS POLITIK HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBRANTASAN
TINDAK PIDANA TERORISME**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H)

ZAINUDIN

NPM : 1321020030

JURUSAN SIYASAH

Pembimbing I : Dr. H. Khairuddin, M.H.

Pembimbing II : Frenki, M.Si



**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1438 H / 2017 M**

ABSTRAK

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari suatu dinasti yang ada dalam sejarah Islam atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al-Rasyidin. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi. Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Pemilihan beliau sebagai khalifah menggantikan Usman yang wafat pada tahun 35 H, melalui cara yang berbeda dari pemilihan khalifah sebelumnya. Selama masa pemerintahannya yang kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Beliau menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh Thalhah cs, Mu'awiyah, dan Khawarij yang mengakibatkan terjadinya perang. Peperangan yang pecah beberapa kali pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, sebab peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru, dan menarik untuk ditelusuri sebab di antara beberapa khalifah pendahulunya belum pernah ada yang turun langsung di medan perang selain beliau dan sekaligus menjadi panglimanya, hanya saja sejarah mencatat bahwa peristiwa itu justru terjadi antar sesama saudara muslim.

Berdasarkan uraian diatas maka masalah yang dapat dirumuskan yaitu: Bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib menurut perpektif fiqih siyasah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk memahami secara mendalam tentang sistem pemerintahan yang terjadi pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Serta untuk memahami secara mendalam tentang sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib menurut perspektif fiqih siyasah. Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan tentang fiqih siyasah yang lebih mendalam, umumnya bagi kawan-kawan mahasiswa jurusan siyasah dan khususnya bagi penulis sendiri.

Dan adapun jenis atau metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu kajian pustaka, dimana data-data yang didapat merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan skripsi ini, dengan acuan pada fiqih siyasah dengan cara membaca dan menelaah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidaklah semulus pemerintahan khalifah sebelumnya, dikarenakan banyaknya tekanan-tekanan politik yang di lakukan oleh para sesama muslim, salah satunya yaitu perang Jamal, dimana perang ini terjadi antara pasukan yang di pimpin oleh Khalifah Ali dengan pasukan yang di pimpin oleh Aisah istri Nabi sendiri, dan perang antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah perang ini disebut juga dengan perang siffin, yang di akhiri dengan perjanjian antara muawiyah dengan Ali yang di balut oleh politik pemerintahan muawiyah.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

Judul : Sistem Pemerintahan Islam pada Era Khalifah Ali
bin Abi Thalib dalam Perspektif Fiqih Siyasah
Nama : Zainudin
NPM : 1321020030
Jurusan : Siyasah
Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Khairuddin, M.H
NIP. 196210221993031002

Pembimbing II

Frenki, M/Si
NIP. 198003152009011017

Ketua Jurusan

Drs. Susiadi AS, M.Sos.I.
NIP. 195808171993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

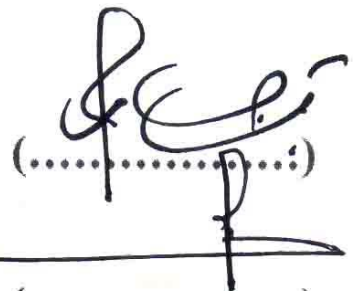
Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB DALAM PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH"** disusun oleh: **Zainudin NPM. 1321020030** Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Rabu. 14 Maret 2018**

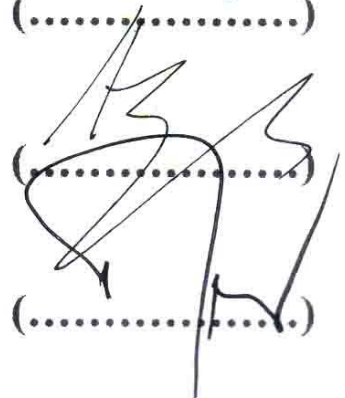
TIM MUNAQOSAH

Ketua : Dr. Jayusman. M.Ag

(.....)


Sekretaris : Muhammad Irfan., S.H.I.. M.Sy. (.....)


Penguji I : Agustina Nurhayati, S.Ag. M.H.

(.....)


Penguji II : Frenki, M. S.i

(.....)


Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag
NIP: 197009011997031002

MOTTO

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggung jawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..¹



¹ *Kitab Riyadhus shalihin* terjemah jilid 1, penerjemah achmad sunarto, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999), h. 603

P E R S E M B A H A N

Penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada kedua orang tua tercinta yakni, Ayahanda Madhali dan Ibunda Juairiah yang tiada henti-hentinya dan tak bosan-bosan mendo'akan yang terbaik untuk saya.
2. Kakak-kakak saya yang tercinta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.
3. Kepada Bapak H. Riza Mirhadi S.H beserta keluarga yang telah memberikan pekerjaan dan dukungannya kepada saya dalam masalah pendidikan.
4. Teman-teman seperjuangan, khususnya untuk kelas B, dan umumnya untuk teman semua yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, yang selalu memberikan dorongan dan semangat juang.
5. Almamater UIN Raden Intan Lampung yang saya banggakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

RIWAYAT HIDUP

Zainudin dilahirkan pada tanggal 01 Januari 1993, di Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran, yaitu putra ke enam dari tujuh bersaudara, yang dilahirkan oleh seorang ibunda yang bernama Juairiah dan memiliki seorang ayahanda yang bernama Madhali.

Pendidikan penulis bermula di Sekolah Dasar Negeri 2 (SD) Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan, aktif serta dalam kegiatan Pramuka, lalu di tamatkan pada tahun 2005, setelah itu melanjutkan pendidikannya di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Miftahul Ikhsan Desa Warunggunung, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Banten. Dan masih aktif di kegiatan pramuka, ditamatkan pada tahun 2008. Pada saat lulus MTS saya tidak langsung melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Atas dikarenakan faktor ekonomi, saya berhenti tidak melanjutkan selama dua tahun, dan selama itu juga saya berusaha mencari kerja, hingga akhirnya saya mendapat pekerjaan di rumah pak H. Riza Mirhadi, S.H. dan Alhamdulillah dapat melanjutkan pendidikan saya di Sekolah Menengah Atas pada tahun 2010, dan saya aktif dalam organisasi PMR, di tamatkan pada tahun 2013. Dan melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Jurusan Siyasah.

KATA PENGANTAR



Assalamualikum Wr. Wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggenggam diri dan seluruh ciptaannya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Quran dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syari'ah, fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri, M.Ag.
2. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. selaku dekan Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. H. Khairuddin, M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas syariah dan Hukum. UIN Raden Intan Lampung. Sekaligus selaku Pembimbing I Dalam penulisan Skripsi.
4. Frenki M.Si Selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
5. Drs. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku ketua jurusan Siasah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

6. Frengki M.Si selaku Sekertaris jurusan Saisah Fakultas syaria'ah.
7. Bapak Dan Ibu Dosen Fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya jurusan (Hukum Tata Negara) yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terimakasih penulis memanjatkan do'a kehadirat Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Amin.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Bandar Lampung 2017

Zainudin
1321020030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iii
PERSETUJUAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. PenegasanJudul	1
B. AlasanMemilihJudul	2
C. LatarBelakangMasalah.....	4
D. RumusanMasalam.....	6
E. Tujuan dan KegunaanPenelitian	6
F. MetodePenelitian.....	7

BAB IISISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT

PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. PengertianPemerintahan Islam	11
B. SistemPemerintahan Islam.....	13
C. Prinsip-prinsipdalamPemerintahan Islam.....	18
D. Sistem Pemilihan Khalifah dalam Islam.....	32

BAB IIPEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA ALI BIN ABI THALIB

A. Biografi Ali Bin AbiThalib.....	35
B. SistemPemerintahan Ali Bin AbiThalib	46
C. Ide-ide Ali Bin AbiThalibTentangPemerintahan.....	48
D. Sistem Pemilihan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Pengaruhnya dalam Sistem Pemerintahan Islam.....	55

BAB VIANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP

SISTEM PEMERINTAHAN ALI BIN ABI THALIB

A. Sistem Pemerintahan Pada Era Ali Bin Abi Thalib	58
B. Sistem Pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam Perspektif Fiqih Siyasah	61

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	65
B. Saran – Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN - LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul ini merupakan uraian dari sub-sub judul, yang merupakan penjelasan dari maksud dan tujuan judul ini sendiri, yang merupakan gambaran dari isi yang terkandung didalamnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun judul skripsi yang penulis kemukakan adalah :SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB (MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH) Agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam judul, maka perlu kiranya penjelasan beberapa istilah, yaitu :

Sistem adalah sekumpulan atau komponen apapun baik fisik maupun non fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu.²

Pemerintahan Islam yaitu sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu yang berpedoman kepada ajaran Islam yaitu Al-qur'an dan Hadis.³

Era adalah kurun waktu atau masa dalam sejarah; sejumlah tahun dalam jangka waktu antara beberapa peristiwa penting dalam sejarah.⁴

Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah seorang pemimpin terakhir atau khalifah ke empat setelah Nabi Muhammad wafat, dan pemimpin-pemimpin Islam sebelumnya.

² Jogianto H.M, *Analisis dan Disain Sistem Informasi*, (Jogjakarta; Raja Grafindo, 2001), h. 2

³ C.S.T. Kansil, dan Christine S. T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Yogyakarta; Bumi Aksara, 2005) h. 7

⁴ <http://Kamus Besar Bahasa Indonesia.web.id> (30 juli 2017, 02.13 WIB)

Perspektif pada sudut pandang sebenarnya yaitu cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.

Fiqh siyasah adalah sebuah pemahaman ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan.⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa maksud dari judul ini sebagaimana menjelaskan tentang sistem pemerintahan pada era Khalifah Ali Bin Abi Thalib, yaitu suatu komponen baik fisik maupun nonfisik yang memiliki tatanan utuh yang saling bekerjasama dalam mencapai tujuan dan fungsi dari pemerintahan yang sesuai dengan ajaran al-Qur'an dan hadis yang dijalankan oleh seorang Khalifah Ali Bin Abi Thalib, yang dikaji dalam perspektif fiqh siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Dalam penulisan penelitian ini terdapat beberapa alasan yang kuat sehingga menarik perhatian untuk mengangkat beberapa permasalahan didalam judul diatas, yaitu :

1. Alasan Obyektif

Berdasarkan latarbelakang diatas sesungguhnya dapat diambil berbagai unsur yang menjadi identifikasi dari judul ini, antara lain:

- a. Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah sahabat Nabi, yang termasuk kelompok Khalifah Rasyidin, yang mendapat jaminan dari Rasulullah SAW sebagai penghuni surga sehingga ada indikasi bahwa Khalifah Ali terlepas dari

⁵Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia: 2007) h. 13-35

kesalahan dan kekeliruan, tetapi masa kepemimpinannya penuh dengan konflik dan tragedi yang memilukan.

- b. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya konflik dalam pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yang masih banyak belum diketahui dan perlu digali lebih mendalam.
- c. Berbagai kemungkinan pengajaran yang dapat diambil dari fenomena pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib untuk dianalisis secara politis, akademis dan agamis.

2. Alasan Subyektif

Dari aspek yang diteliti mengenai permasalahan sistem pemerintahan Islam pada era Khalifah Ali Bin Abi Thalib tersebut tersedianya literature yang menunjang, maka sangat memungkinkan untuk dilakukan penelitian. Judul ini dipilih karena sangat relevan dengan disiplin ilmu di Fakultas Syariah jurusan Siyasah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

C. Latar Belakang Masalah

Ali bin Abi Thalib adalah khalifah keempat dan terakhir dari suatu dinasti yang ada dalam sejarah Islam atau yang lebih dikenal dengan dinasti Khulafa al-

Rasyidin. Ali adalah sepupu dan menantu Nabi.⁶ Ali adalah putra Abi Thalib bin Abdul Muthalib⁷. Pemilihan beliau sebagai khalifah menggantikan Usman yang wafat pada tahun 35 H, melalui cara yang berbeda dari pemilihan khalifah sebelumnya.

Selama masa pemerintahannya yang kurang dari 5 tahun, beliau menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikitpun dalam pemerintahannya yang dapat dikatakan stabil. Beliau menghadapi berbagai tantangan yang dilancarkan oleh Thalhah cs, Mu'awiyah, dan Khawarij yang mengakibatkan terjadinya perang.

Peperangan yang pecah beberapa kali pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib menjadi sangat penting dalam catatan sejarah Islam, sebab peristiwa itu memperlihatkan sesuatu yang baru, dan menarik untuk ditelusuri sebab diantara beberapa khalifah pendahulunya belum pernah ada yang turun langsung di medan perang selain beliau dan sekaligus menjadi panglimanya, hanya saja sejarah mencatat bahwa peristiwa itu justru terjadi antar sesama saudara muslim.⁸

Tidak selesai disini saja, setelah selesai perang Jamal berahir masih banyak permasalahan yang timbul sehingga terjadi kembali peperangan antar muslim yaitu antara angkatan perang Ali dan pasukan Muawiyah di kota Siffin, dekat sungai Eufrat, pada tahun 37 H. dan Muawiyah sendiri dapat di kalahkan sehingga menyebabkan mereka mengangkat al-Qur'an sebagai tanda damai dengan cara tahkim (arbitrase), yakni perselisihan yang diselesaikan oleh dua orang penengah sebagai pengadil.⁹ Namun ternyata hal tersebut tidaklah menyelesaikan permasalahan

⁶ Eri Rosatria, *Sejarah Kebudayaan Islam* (Jakarta: Dirjen Pen, 2009), h. 191.

⁷ Samsul Munur Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 109.

⁸ *Ibid*, 111

⁹ Khoiriyah, *Reorientasi Wawasan Sejarah Islam*, (Yogyakarta: teras, 2012), h. 63

yang terjadi, akan tetapi malah menambah masalah yang baru yang semakin fatal bagi Khalifah Ali dan tentara semakin lemah sehingga memaksa Khalifah Ali menyetujui perjanjian damai dengan Muawiyah, yang secara politis berarti Khalifah mengakui keabsahan kepemilikan Muawiyah atas Syiria dan Mesir.¹⁰

Dalam definisi fiqh siyasah sendiri khilafah atau imamah haruslah mendahulukan masalah-masalah agama dan memelihara agama ketimbang urusan duniawi. Hal ini rupanya diperlukan untuk membedakan antara lembaga imamah atau khilafah, dengan lembaga-lembaga lainnya. Di dalam sejarah Islam, kita tahu bahwa gelar khilafah lebih digunakan daripada imam, kecuali dikalangan orang-orang syi'ah. Abu Bakar Sidiq disebut khalifah, demikian pula Umar, Usman dan Ali. Bahkan gelar khalifah ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyah.¹¹

Di dalam al-Quran kata-kata khalifah lebih merujuk pada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang kepala Negara. Kata khalifah sebagai kepala Negara adalah “pengganti” Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian. Dia tidak maksum, tidak mendapat wahyu, dan tidak memonopoli hak dan menafsirkan agama. Dia adalah manusia biasa yang dipercaya oleh umat karena baik di dalam menjalankan agamanya, bersifat adil seperti yang tampak di dalam pribadi Abu Bakar dan Khulafa ar-Rasyidin.¹²

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib sendiri tidaklah berbeda dengan definisi dalam fiqh siyasah, namun dalam pemerintahan Ali belum bisa sepenuhnya mensejahterakan

¹⁰ Badriyatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 40

¹¹ Prof. H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana 2009), h. 57

¹² Ibid, h. 59

rakyatnya, di karenakan banyaknya konflik-konflik yang di hadapi oleh Khalifah Ali. Oleh karna itu perlu pembahasan lebih lanjut tentang bagaimana kekhalifahan pada masa khalifah Ali itu sendiri menurut perspektif fiqh siyasah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas pada bab berikutnya, yaitu:

1. Bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib ?
2. Bagaimana sistem pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib menurut perspektif fiqh siyasah ?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian.
 - a) Untuk memahami secara mendalam tentang sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib.
 - b) Untuk memahami sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib menurut perspektif fiqh siyasah
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat teoritis penulisan ini adalah untuk memberikan kontribusi keilmuan tentang bagaimana politik hukum sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi thalib dalam Islam bagi Fakultas Syari'ah pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

- b. Manfaat praktis dalam penulisan ini adalah untuk memperkaya khazanah keilmuan tentang politik pemerintahan pada masa lalu, khususnya pada masa pemerintahan khalifah Ali bin abi Thalib.

F. Metode penelitian

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi, dengan berbagai macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹³ Yaitu dengan metodologi kepustakaan atau riset yang dilakukan dengan cara membaca buku, majalah, makalah, serta sumber lain yang tersedia dan berkaitan dengan judul yang dimaksud¹⁴. Dalam hal ini penelitian yang menekankan sumber utama informasinya dari buku-buku tentang sistem pemerintahan pada era khalifah Ali bin abi Thalib.

¹³ Kartini kartono, *Pengantar metodologi Riset Social*, (Bandung; Alumni, 1989), h. 29

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, (Yogyakarta; YP Fakultas Psikologi UGM, 1985), h. 42

Penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis, merupakan penelitian dengan memaparkan seluruh data kemudian menganalisis secara detail sehingga pada akhirnya menghasilkan kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang sejarah, keadaan, dan gejala-gejala lainnya. Pada penelitian ini menjelaskan gambaran umum tentang sejarah sistem pemerintahan pada era Ali, kemudian dianalisis berdasarkan dengan sejarah fiqh siyasah.

2. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan dengan melakukan langkah-langkah berikut :

a. Bahan Primer

Bahan primer yaitu bahan utama dalam penelitian, yaitu studi pustaka yang berisikan tentang sistem pemerintahan kholifah Ali bin Abi Thalib.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan yang berisikan tentang informasi yang mendukung data primer. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta jurnal yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

3. Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis data yang telah terkumpul untuk meningkatkan pemahaman peneliti untuk

melakukan analisis data yang telah terkumpul secara sistematis maka peneliti menggunakan dua macam cara yaitu :

a. Content Analysis

Content analysis yaitu menggambarkan secara umum tentang objek yang akan diteliti.

b. Comparative Analysis

Penelitian komparasi atau perbedaan adalah jenis penelitian dengan 2 variabel atau lebih yang bertujuan untuk membedakan atau membandingkan hasil penelitian antara dua kelompok penelitian. Analisis ini digunakan untuk membandingkan teori dan objek yang dikaji sehingga peneliti dapat menemukan kelemahan dan kelebihan dari objek yang dikaji tersebut.

Dalam penelitian ini buku-buku yang berkaitan dengan sistem pemerintahan khalifah Ali diteliti secara sistematis kemudian dibandingkan sehingga diperoleh kesimpulan yang menunjukkan kelemahan dan kelebihan.

4. Pedoman Penulisan

Adapun pedoman yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku penulisan skripsi Fakultas Syari'ah yang diterbitkan oleh fakultas Syari'ah dan buku pedoman penulisan lainnya yang ada relevansinya dengan penulisan ini.



BAB II

SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM MENURUT PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH

A. Pengertian Pemerintahan Islam

Dalam pemerintahan Islam atau dapat disebut juga sebagai Khilafah adalah sebuah kekuasaan yang menerapkan syariah islam secara *kaffah* (menyeluruh)¹⁵. Dalam sebuah Negara, adanya seorang pemimpin merupakan sebuah kebutuhan bagi umat Islam untuk mengangkat seorang Khalifah yang akan memimpin umat Islam dengan baik dan benar, sesuai dengan yang di syariah Islam dalam al-Qur'an dan hadis. Seperti yang di sebutkan dalam al-Qur'an, surah Al-Maa-idah ayah 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لَيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya:

Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. hanya kepada Allah-lah

¹⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung; Sinar Baru Algensindo, 2013) h. 493

kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Maka, tegaknya Daulah Khilafah adalah sebuah kewajiban, dan setiap kelalaian dalam upaya untuk menegakannya merupakan dosa besar. Rasulullah SAW memerintahkan umat Islam untuk memberikan bai'at kepada seorang Khalifah. Dengan Syariah Islam, Khilafah memelihara seluruh urusan umat manusia. Jika syariah tidak diterapkan dalam naungan Daulah Khilafah, maka kedaulatan Islam dalam seluruh aspek kehidupan manusia tidak akan pernah terwujud secara nyata. Maka kerahmatan Islam yang dijanjikan juga tidak bisa dirasakan secara nyata pula¹⁶.

Khilafah adalah sistem politik Islam. Khilafah tidak sama dengan sistem diktator, tapi juga bukan sistem demokrasi. Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan negara seyogyanya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moreal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, Dalam pemerintahan Islam setiap orang, kelompok, partai, anggota Majelis Umat atau *qodhi* mahkamah madzalim bisa mengontrol dan mengoreksi Khalifah. Islam memerintahkan untuk memberhentikan seorang Khalifah jika terbukti memerintah bukan dengan syariah Islam (Al-qur'an dan Hadis), atau bersikap dzalim kepada rakyat. Maka jika kedzaliman terjadi, masyarakat berhak mengajukan pengaduan kepada mahkamah madzalim. Jika kedzaliman itu terbukti dilakukan oleh Khalifah, maka Mahkamah Madzalim berhak memberhentikannya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

B. Sistem Pemerintahan Islam

Sistem pemerintahan Islam merupakan sebuah sistem pemerintahan yang demokratis, karena dalam pemerintahan Islam dikenal dengan adanya kekuasaan Legislative, Eksekutif dan Yudikatif.

1. Ahlul-halli wal-aqdi (legislative)

Badan legislative adalah: lembaga pemerintahan yang secara terminologi fiqh disebut lembaga penengah dan pemberi fatwa. Yang di Negara-negara modern disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).¹⁷

¹⁶ *Ibid*, h. 496

¹⁷ Al Mubarak, *Sistem Pemerintahan dalam Perspektif Islam*, Terj, Firman Hariyanto (Jakarta; Pustaka Mantik, 1995), h.92

Kekuasaan yang berfungsi membuat undang-undang atau lembaga pemegang pemberi fatwa, yang mereka sampaikan itu tidak boleh bertentangan dengan al-Qur'an dan al-Hadits.

Dalam Negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan (kedaulatan ditangan tuhan) tidak dapat melakukan legislasi yang betolak belakang dengan al-Qur'an dan sunah sekalipun consensus rakyat yang menentukan. Maka secara otomatis timbul prinsip bahwa lembaga ini dalam Negara Islam sama sekali tidak berhak membuat perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan Tuhan dan Rasul-nya.

Allah berfirman dalam surat An-Nisa: 105

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya:

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat.¹⁸

Tugas lembaga ini menurut al-Maududi adalah sebagai berikut:

- Bila pedoman-pedoman sudah jelas dari al-Qur'an dan Rasulnya maka lembaga ini tidak dapat mengubahnya, lembaga ini berkompeten untuk menegakkannya.
- Bila pedoman-pedoman dari al-Qur'an dan sunah ada kemungkinan interfensi lebih lanjut, maka lembaga ini harus memutuskan penafsiran, harus ditempatkan dalam undang-undang dasar (UUD).
- Bila tidak ada isarat dalam al-Qur'an dan sunah, maka lembaga ini berkewajiban menegakan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sama.

¹⁸ Al-Qur'an dan Terjemah

- d. Dan bila masalah apapun al-Qur'an dan sunah tidak memberikan pedoman walaupun sifatnya dasar sekalipun, tidak ada dalam konvensi Al Khulafa Ar Rasyidin, maka dalam hal ini dapat diartikan, kita bebas mengadakan legislasi menurut yang terbaik sepanjang tidak bertentangan dengan esensi ketetapannya.¹⁹

Jadi pada dasarnya fungsi dari lembaga ini merupakan pengontrol kebijakan pemerintah (lembaga eksekutif) serta memberi masukan pada kebijakan itu sendiri (UUD) dan yang paling penting adalah merumuskan suatu kebijakan itu tentang suatu masalah yang tidak terdapat dalam pedoman yang sifatnya dasar sekalipun dalam al-qur'an dan Sunah, sepanjang kebijakan itu tidak bertentangan dengan al-quran dan sunah itu sendiri.

Sedangkan pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib, lembaga ini di pegang langsung oleh seorang khalifah, bahwasannya yang membuat dan mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang adalah khalifah Ali bin Abi Thalib sendiri.

2. Sultan Tanfidziyyah (eksekutif)

Yaitu kekuasaan yang bertujuan untuk menegakan pedoman-pedoman yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits, atau dengan kata lain, kekuasaan ini berfungsi untuk melaksanakan undang-undang. Dalam bahasa modern, lembaga ini meliputi kepala Negara, menteri-menteri, dan seluruh pegawai kementerian. Tujuan lembaga ini intinya untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikan melalui al-Qur'an dan Sunah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui dan menjelaskan pedoman-pedoman yang telah dianjurkan dalam kehidupan berbangsa.

Lembaga ini sangat penting dalam Negara, maka dari itu kaum muslimin (masyarakat) diwajibkan untuk mentaati dan menjunjung tinggi segala perintahnya dengan syarat lembaga ini mentaati Allah dan Rasul-nya serta menghindari dari dosa besar.

Dan jika lembaga ini menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-nya maka rakyat (kaum muslimin) diperkenankan untuk mengubah orde yang ada. Maka terlihat dengan jelas para pemimpin maupun lembaga-lembaga yang ada tidak diperkenankan memerintah dengan sewenang-wenang, bila sampai terjadi rakyatlah yang diperkenankan untuk menumpas dan meluruskan penyimpangan itu.

¹⁹ al Maududi, *Sistem Politik Islam*, (Bandung; Mizan, 1990), h. 246

Akan tetapi ketaatan masyarakat kepada pemimpin menurut al-Maududi dibatasi dua hal sebagai berikut:

- a. Pemimpin haruslah dari kalangan kaum muslimin itu sendiri
- b. Pemimpin harus taat kepada Allah dan Rasul-nya serta segala aktifitasnya mereka harus sejalan dengan apa yang tersirat dalam syari'ah.

Dari penjelasan di atas maka terlihat sedikit sekali kemungkinan terjadinya kediktatoran di dalam Negara Islam. ini dikarenakan rakyat memiliki rasa tanggung jawab dalam Negara tersebut secara keseluruhan.

3. Sultan Qodoiyyah (Yudikatif)

Kekuasaan kehakiman yang mengendalikan setiap pelanggaran undang-undang, oleh karena itu kekuasaan ini harus terpisah, bersifat bebas dan terlepas dari campur tangan oleh badan lain, sehingga dia dapat membuat keputusan yang benar dan murni tanp ada pengaruh dari manapun.²⁰

Dimasa pemerintahan Rasullullah, ketiga kekuasaan itu dipegang langsung oleh Rasullallah sendiri, karena di masa itu wilayah Islam baru sedikit dan cukup ditangani oleh beliau sendiri. Rasullullah sebagai pemegang kekuasaan legislatif, beliau menyampaikan apa saja yang diterima dari Allah dan ditambahkan dengan amalan Rasul dengan bentuk sunahnya yang memiliki otoritas dan fungsi sebagai sumber hukum. Sebagai pemegang kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif beliau bertugas mengatur mekanisme pemerintahan dan kemaslahatan, serta mengadili pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.²¹ Berbeda dengan masa khalifah Ali bin Abi Thalib, jabatan yudikatif ini pernah di pegang oleh beberapa orang yaitu:

- a. Syuraih bin Harits di Kufah
- b. Abu Musa al-Asy'ari di Kufah
- c. Malik bin Harits di Mesir
- d. Ubaidillah bin Mas'ud di Yaman
- e. Usman bin Hanif di Mesir
- f. Qais bin Said di Mesir

²⁰ Abu a'la al Maududi, *Khalifah dan Kerajaan*, (bandung; Mizan, 1984), h. 245

²¹ Atiyah Musarapah, *Al Qhad Fil Islam*, (Jakarta; as-sarqa al-autsar, 1996), h. 91

- g. Umarah bin Syihab di Kufah
- h. Qatsam bin Abbas di Basrah
- i. Ju'adah bin Hubairah al-Mahzumi di Khurazan
- j. Abdullah bin Abbas di Basrah
- k. Sa'id bin Namran al-Hamadzani di Kufah
- l. Baidah al-Salmani di kufah
- m. Muhammad bin Yazid bin Khalidah al-Saibani di Kufah

Itulah beberapa orang yang pernah memegang jabatan yudikatif pada masa pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib.

Dalam ruang lingkup fiqh siyasah, kebijakan-kebijakan dalam menjalankan pemerintahan yang di kemukakan oleh T. M. Hasbi, beliau membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Siyasah Tasyri'iyyah (kebijakan tentang penetapan hukum)
2. Siyasah Dusruriyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
3. Siyasah Qodla'iyyah (kebijakan peradilan)
4. Siyasah Maliyyah (kebijakan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah (kebijakan administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah (kebijakan hubungan luar negeri atau internasional)
7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang)
8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan)

C. Prinsip-prinsip dalam Pemerintahan Islam

Menurut teori Islam, dalam mekanisme operasional pemerintahan Negara seyogianya mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Islam sebagai landasan etika dan moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Secara *konseptial* dikalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik, menurut Mumtaz Ahmad

dalam bukunya *State, Politics, and Islam*, menekankan tiga ciri penting sebuah Negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat muslim (ummah), hukum Islam (syariah) dan kepemimpinan masyarakat muslim (Khilafah).

Prinsip-prinsip dalam pemerintahan Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-teks syariah yang jelas dan tegas.

1. Prinsip-prinsip dari Al-Qur'an²²

- a. Kedudukan manusia diatas bumi setatus menjadi Khalifah Allah menimbulkan peran-peran tertentu yang harus dijalankan oleh manusia.

Manusia bertugas untuk mengatur dan memimpin bumi dengan baik sesuai dengan kualitas dan sifat-sifat Allah tetapi hanya sebatas kemampuan manusia. Oleh sebab itu manusia harus menyebarkan kebaikan di muka bumi dan mencegah serta menghilangkan segala bentuk kemudharatan dimuka bumi. Oleh karena itu manusia wajib mengelola, merawat, dan memanfaatkan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh makhluk. Abul A'la al Maududi meletakkan prinsip kekhilafahan manusia sebagai salah satu dari tiga prinsip yang mendasar sistem politik Islam. Dua prinsip lainnya adalah prinsip keesaan Tuhan (Tauhid) dan prinsip kerasulan. Menurut ajaran Islam, manusia adalah wakil tuhan dimuka bumi karena manusia mengemban kuasa yang didelegasikan tuhan dalam batas-batas yang ditentukan-nya dan bertugas melaksanakan kekuasaan tuhan tersebut sesuai dengan kehendak tuhan.²³

Allah berfirman dalam Q.S an-Nisa ayat 58, sebagai berikut²⁴

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ ﴾

﴿ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝ ﴾

Artinya:

²² Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta; , PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 5-12

²³ Abul A'la al-Maududi, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, dari *Human Rights in Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, 1995), h. 1-2

²⁴ Al-Qur'an dan terjemah

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

- b. Prinsip manusia sebagai umat yang Satu meskipun manusia berbeda suku bangsa, warna kulit, bahkan agama.

Walau dalam negara kita banyak sekali suku bangsa, warna kulit serta agama, akan tetapi merupakan satu kesatuan manusia karena sama-sama mahluk Allah. Dengan demikian, perbedaan antar manusia harus disikapi dengan pikiran yang positif untuk saling memberikan kelebihan masing-masing dan saling menutupi kekurangan masing-masing. Keberpihakan Islam pada prinsip persaudaraan dan persamaan didasarkan pada tujuan yang hendak diraih yakni adanya pengakuan terhadap persaudaraan semesta dan saling menghargai diantara sesama umat manusia sehingga dapat tercipta kehidupan yang toleran dan damai.

Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. Al Hujurat ayat 11²⁵

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ

خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّغَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ

فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya:

²⁵ Al-Qur'an dan terjemah

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.

- c. Prinsip menegakan kepastian hukum dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Amanah merupakan amanah rakyat yang diberikan kepada seorang pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kontrak sosial. Bagi pengembalian amanah harus mampu menjalankan titah rakyat sekaligus harus mampu menjadi pelayan rakyat dan wajib hukumnya untuk bersikap adil.

Seperti dalam firman Allah dalam Q.S. an-Nisaa ayat 135.²⁶

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا هَوًى ۖ إِنْ تَعْدِلُوا ۖ وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللّٰهَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena

²⁶ Al-Qur'an dan terjemah

ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

d. Prinsip kepemimpinan.

Allah telah menjadikan kalian sebagai penguasa diatas muka bumi, yang telah menggantikan umat dan masyarakat yang sebelum-nya, juga Allah telah mengangkat sebagian dari kamu beberapa derajat tingkat dari yang lain, kekuasaan dan ketinggian derajat itu tidak lain Allah akan menguji kalian dengan ujian yang sesuai atas kemampuan manusia itu sendiri, karena allah tidak akan memberikan ujian atau cobaan di luar kemampuan umatnya, bagaimana menerima, mempergunakan dan mensyukuri pemberian tuhanmu itu.

e. Prinsip musyawarah.

Prinsip ini menghendaki agar hukum perundang-undangan dan kebijakan politik diterapkan melalui musyawarah di antara mereka yang berhak. Masalah yang diperselisihkan para peserta musyawarah harus diselesaikan dengan menggunakan ajaran-ajaran dan cara-cara yang terkandung dalam al-Qur'an dan sunah Rasullallah SAW. Prinsip musyawarah ini diperlukan agar para penyelenggara Negara dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan bertukar pikiran dengan siapa saja yang dianggap tepat, guna mencapai tujuan yang terbaik untuk semua.

f. Prinsip persatuan dan persaudaraan. Terkandung dalam surat Al-Hujarat ayat 10²⁷

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Artinya:

²⁷ Al-Qur'an dan terjemah

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.

- g. Prinsip hidup bertetangga/hubungan antara negara bertetangga.

Kemestian mempertahankan kedaulatan Negara, dan larangan melakukan Agresi dan Infasi, tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 190.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقْتُلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿١٩٠﴾

Artinya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

- h. Prinsip perdamaian dan peperangan/hubungan Internasional.

Islam sebagai Agama rahmatan lil alamin mengedepankan prinsip perdamaian dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan tujuan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tersebut. Sebagaimana tercantum dalam surat Al-Anfal ayat 61.²⁸

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦١﴾

Artinya:

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

²⁸ Al-Qur'an dan terjemah

i. Prinsip ekonomi dan perdagangan.

Dalam kehidupan masyarakat tentunya tak lepas dari kegiatan ekonomi, di dalam ilmu fiqih ini sudah diatur secara jelas bagaimana bentuk bermuamalah dengan baik. Sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu.

j. Prinsip hak-hak asasi. Semua warga Negara dijamin hak-hak pokok tertentu.

Menurut Subhi Mahmassani dalam bukunya *Arkan Hukum Al-Insan*, beberapa hak warga Negara yang perlu dilindungi adalah: jaminan terhadap keamanan pribadi, harga diri dan harta benda, kemerdekaan untuk mengeluarkan pendapat dan berkumpul, hak untuk mendapatkan pelayanan hukum secara adil tanpa diskriminasi, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, pelayanan medis dan kesehatan, serta keamanan untuk melakukan aktifitas-aktifitas ekonomi.

2. Prinsip-prinsip dari Hadis

a. Prinsip kebutuhan akan pemimpin.

إِذْ كُنَّا ثَلَاثَةً فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

Seperti yang diriwayatkan oleh hadis seperti berikut “apabila ada tiga orang bepergian keluar, hendaklah salah seorang diantara mereka menjadi pemimpin” (H.R Abu Daud)²⁹

b. Perinsip tanggungjawab seorang pemimpin.

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

“Dari Ibnu Umar ra., ia berkata: Saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda: “kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya..”(HR. Bukhari dan Muslim)³⁰

c. Prinsip hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin berdasarkan persaudaraan saling mencintai.

وَعَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خِيَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشِرَارُ أَيْمَتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَلَعَنُونَهُمْ وَلَعَنُونَكُمْ، قَالَ: فَلَنَّا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَبْذُرُهُمْ؟ قَالَ: لَا، مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ.

Dari Auf bin Malik ra., ia berkata: saya mendengar Rasulullah saw. Bersabda : “Pemimpin yang bijaksana adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian, kalian selalu mendoakan atasnya dan ia selalu mendoakan kalian. Pemimpin yang terjahat adalah yang kalian benci dan membenci kalian, sedang kalian mengutuknya dan ia mengutuk kalian, “ Kami bertanya : “Wahai Rasulullah saw. Sebaiknya kita pecat saja mereka itu. “Beliau menjawab:

²⁹ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, vol,III, (Daar Al-Hadist, al-Qahirat 1998), h. 37

³⁰ Imam Nawawi, *Riyadhus shalihin terjemah*, jilid I (Jakarta, Pustaka Amani: 1999), h. 603

“Jangan, selama ia masih mengerjakan shalat berjamaah dengan kalian.” (HR. Muslim)³¹

d. Prinsip ketaatan.

وَعَنْ ابْنِ عُمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

“Wajib atas seorang muslim mendengarkan dan mentaati baik yang disenangi maupun tidak, kecuali jika ia perintahkan untuk berbuat maksiat” (H.R Bukhari).³²

e. Prinsip tolong menolong oleh yang kuat atas yang lemah dan yang kaya atas yang miskin.

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ أَصَابِعُهُ

Dari Abu Musa dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam beliau bersabda: “seorang mu'min dengan mu'min yang lain seperti sebuah bangunan, yang mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.” Dan beliau merapatkan jari-jarinya.” (H.R Bukhori dan Muslim)³³

f. Prinsip kebebasan berpendapat.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، وَذَلِكَ أَوْفَى الْأَيَّامِ

Dari Abu Sa'id Al Khudri radiyallahuanhu berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda: “Siapa diantara kamu melihat kemungkaran maka hendaklah ia ubah dengan tangannya, jika tidak mampu dengan lisannya dan jika

³¹ Ibid h. 601

³² Ibid, h. 611

³³ <https://assalafiyahkebumen.wordpress.com> tolong menolong dalam kebaikan, (di unggah: 27-03-2010). Di ambil pada 20 februari 2018 jam 00:30 wib

*bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*³⁶

Ayat tersebut dapat ditarik beberapa kesimpulan yakni pertama, sama halnya dalam ayat sebelumnya bahwa terdapat perintah kepada orang yang beriman supaya menjadi manusia yang lurus (adil) dari perkataan karena Allah. Kedua, adanya perintah kepada orang-orang yang beriman supaya menjadi saksi yang adil, artinya dalam kesaksiannya itu, ia tidak memihak kepada siapapun, kecuali kepada kebenaran. ketiga, larangan kepada orang-orang yang beriman untuk bersikap adil, karena motivasi emosional atau sentimen yang negatif (benci) kepada sekelompok manusia.

Untuk menjadi saksi yang adil dalam hal ini penulis berpendapat bahwa setiap orang yang akan menjadi saksi harus terlepas dari suatu perasaan apapun dalam arti bahwa dilarang untuk belas kasih kepada suatu kelompok atau orang tertentu saat menjadi saksi, terkecuali boleh dalam hal kebenaran. Keempat, perintah kepada orang-orang yang beriman supaya bersikap adil, karena adil lebih dekat dengan taqwa.

Ayat Al-Qur'an yang mengandung perintah menegakkan keadilan diantara sesama manusia itu yaitu surah Al-Maidah ayat 8, an-Nahl ayat 90, an-Nisa ayat 58, an-Nisa ayat 135, Al-An'am ayat 90, Asy-syura ayat 15. Keadilan merupakan prinsip Dalam Islam keadilan merupakan kebenaran dan kebenaran merupakan salah satu nama Allah, dalam islam keadilan merupakan hal yang sangat penting dalam Islam, karena Allah sendiri memiliki sifat adil (keadilan penuh dan dengan kasih sayang kepada makhluknya) hal ini sesuai dengan surah Al-An'am ayat 160.

³⁶ Al-Qur'an dan Terjemah

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا^ط وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا تُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦١﴾

Artinya:

*Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan Barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka Dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).*³⁷

Prinsip keadilan dalam nomokrasi Islam mengandung suatu konsep yang bernilai tinggi. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Sebaliknya konsep nomokrasi Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Manusia bukanlah merupakan titik sentral, melainkan ia hanya hamba Allah yang nilai-nilainya ditentukan oleh hubungan dengan Allah dan dengan sesama manusia menurut Al-Qur'an *hablun minallah wa hablun minanas*.

h. Prinsip dalam mengangkat para pejabat Negara atau pelaksana suatu urusan.

Barang siapa memegang kekuasaan, mengurus urusan kaum muslimin, kemudian ia mengangkat seseorang padahal ia menemukan orang yang lebih pantas bagi kaum muslimin daripada orang itu, maka sungguh ia telah mengkhianati Allah dan Rasul-nya. Maka bagi para pemimpin janganlah mengangkat seseorang dengan sembarangan, akan tetapi harus dengan teliti dari segi kemampuan orang yang akan diangkat tersebut, apakah ia mampu atau tidak dalam menanggung beban yang akan diberikan kepadanya, dan jika orang tersebut tidak mampu menjalankan tugas yang diberikan padanya maka tugas tersebut tidak akan dapat dijalankan dengan baik olehnya.

³⁷ Al-Qur'an dan Terjemah

D. Sistem Pemilihan Khalifah dalam Islam

Kepemimpinan adalah salah satu aspek yang di anggap sangat penting dalam Islam. Karena pemimpin salah satu factor yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan suatu masyarakat dalam suatu Negara, dalam Agama Islam, semua persoalan yang menyangkut kehidupan umat manusia telah ada aturannya yang sangat jelas dan detail. Salah satu tugas umat Islam yaitu diharuskannya memilih seorang Khalifah atau pemimpin, dalam Islam sistem pemilihan Khalifah sendiri harus lah sesuai dengan ajaran Allah yakni dengan cara bermusyawarah, maka wajib atas umat Islam untuk memilih seorang Khalifah. Menurut syariat Islam, bahwa dalam memilih seorang Khalifah harus dengan bermusyawarah, seperti yang disebutkan dalam firman Allah dalam surah asy-Syuura ayat 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.³⁸

Jadi dalam memilih pemimpin atau Khalifah haruslah seorang pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasulnya, serta menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai pedoman dalam menjalankan pemerintahannya. Dalam sistem pemerintahan Islam sendiri, seorang Khalifah dapat menjabat sampai akhir hayatnya selama dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan syariat Islam. Dan dalam sistem pemilihan dalam islam sendiri dapat melalui pencalonan yang di ajukan langsung oleh masyarakat atau dapat juga dengan ditunjuk langsung oleh para tokoh ulama pada masa itu, sedangkan dalam pemilihanya haruslah oleh orang-orang yang sesuai dengan syariat islam, yakni orang-orang yang berakal sehat, balig, dan tidak dengan pemaksaan dari pihak-pihak tertentu.

Dalam Islam memilih seorang pemimpin walau dalam sebuah kelompok yang kecil sekali pun, Nabi memerintahkan seorang muslim agar memilih dan mengangkat

³⁸ Al-Qur'an dan Terjemah

salah seorang dari mereka sebagai pemimpin. Kisah pembaiatan Abu Bakar di Saqifah Bani Saidah sesaat paska wafatnya Rasulullah adalah bukti lain betapa pentingnya arti kepemimpinan ini dalam Islam. Saat jasad Nabi yang belum lagi dimakamkan, para sahabat lebih mendahulukan memilih Khalifah pengganti Nabi daripada menyelenggarakan pemakaman beliau yang mulia dan agung.

Salah satu bagian dari topik kepemimpinan yang banyak dibahas dalam al-Qur'an adalah soal memilih seorang pemimpin yang non muslim bagi kaum muslimin. Al-Qur'an telah memberikan begitu banyak tuntunan dan petunjuk bagi kaum muslimin agar tepat dalam memilih figure seorang pemimpin. Tidak cukup dengan kalimat bernada anjuran, ayat-ayat soal ini bahkan disampaikan dengan bahasa perintah dan larangan yang sangat tegas. Tidak hanya sampai disana, beberapa ayat bahkan disertai dengan ancaman yang sangat serius bagi yang melanggarnya.

Kesepakatan para ulama salaf dalam memahami ayat-ayat tersebut juga menunjukan bahwa ayat-ayat tentang larangan memilih pemimpin non muslim bagi kaum muslimin telah disepakati, sehingga tidak muncul perbedaan pendapat di kalangan mereka. Adapun ada beberapa pendapat yang membolehkan memilih pemimpin yang non muslim, itu umumnya difatwakan oleh generasi saat ini, bukan dari kalangan ulama salaf. Karena itu, pemahaman yang demikian biasanya hanya dipandang sebagai pemahaman yang nyeleneh di kalangan para ulama ahli fiqih, bahkan batil.

Fakta-fakta ini memperlihatkan bahwa persoalan memilih seorang pemimpin itu merupakan salah satu persoalan yang di pandang sangat penting dalam pandangan islam. Karena memilih seorang pemimpin itu tidak hanya menyangkut persoalan duniawi saja, akan tetapi mencakup sebuah persoalan tentang akidah yang di miliki pemimpin tersebut.

BAB III

PEMERINTAHAN ISLAM PADA ERA ALI BIN ABI THALIB

A. Biografi Ali Bin Abi Thalib

Namanya adalah Ali bin Abi Thalib (Abdu Manaf) bin AbdulMuthalib dipanggil juga dengan nama Syaibah al-Hamdi bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qusai bin Kilab bin Lu'ai bin Ghalib bin Pihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dia adalah khalifah keempat dari Khulafaur Rasyidin. Dia adalah anak Paman Rasulullah dan bertemu dengan beliau pada kakeknya yang pertama yaitu Abdul Muthalib bin Hasyim. Kakeknya ini memiliki anak bernama Abu Thalib, saudara kadung Abdullah, ayah dari Nabi Muhammad saw. Nama yang diberikan kepada Ali pada saat kelahirannya adalah Asad (singa). Nama tersebut hasil pemberian ibunya sebagai kenangan terhadap nama bapaknya yang bernama Asad bin Hasyim.³⁹

Ketika Ali lahir, ayahnya Abu Thalib tidak ada di tempat. Oleh sebab itu pemberian nama Asad hanyalah pemikiran istrinya, ibu Ali. Setelah mengetahui nama yang diberikan kepada anaknya adalah Asad (Haider) Abu Thalib merasa kurang tertarik sehingga nama itu digantinya dengan Ali⁴⁰. Nama inilah yang populer di kalangan umat Islam sampai sekarang.

Selain nama yang banyak diketahui umat Islam Ali memiliki nama lain yang patut diketahui. Salah satu gelar itu adalah Abu Turab. Istilah *abu* dalam bahasa Arab berarti bapak dan *turab* berarti tanah. Dengan demikian *abu turab* berarti bapak tanah. Karena pemberian Rasulullah Ali merasa senang saja dengan gelar itu. Pemberian gelar ini mempunyai latar belakang tersendiri. Ketika berkunjung ke rumah Fathimah, putri beliau, Rasulullah Saw bertemu Ali. Karena itu beliau bertanya kepada putrinya tentang keberadaan Ali. Fathimah pun menjelaskan bahwa telah terjadi perselisihan antara Fatimah dengan Ali, lalu Ali marah dan pergi meninggalkan rumah. Oleh sebab itu, Nabi menyuruh seseorang laki-laki yang ada di rumah itu untuk mencari informasi di mana Ali berada. Setelah informasi diperoleh orang itu mengabarkan bahwa Ali sedang tidur di mesjid. Kemudian Rasulullah menjumpai dan benar Ali sedang tidur di mesjid tanpa baju dan tanpa alas sehingga badannya bertaburan debu. Karena itu Rasulullah membangunkannya dan memanggil dengan ucapan "wahai Abu At-Turab". Semenjak itu Ali mendapat gelar Abu Turab.⁴¹ Gelar ini dipakai, kemudian dipakai oleh lawan-lawannya dan ini didukung oleh beberapa Orientalis. Kabarnya orang-orang Syi'ah disebut orang Turabiyah dan pengikut Ali

³⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Biografi Ali Bin Abi Thalib*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), h. 13

⁴⁰ *Ibid*, h. 14.

⁴¹ *Ibid*. h. 15.

disebut Turabi.⁴² Gelar lain yang diperoleh Ali adalah Abu al-Hasan karena ia memiliki seorang anak yang bernama Hasan.⁴³

Ali bin Abi Thalib lahir di Mekah dekat Ka'bah.⁴⁴ Menurut al-Faqihi, dan al-Hakim seperti dikutip as-Shalabi Ali bin Abi Thalib adalah orang pertama yang lahir di Ka'bah.⁴⁵ Terjadi perbedaan pendapat sejarawan tentang waktu kelahiran Ali bin Abi Thalib. Menurut Hasan al-Basri seperti dijelaskan As-Shalabi, Ali lahir 15 atau 16 tahun sebelum kenabian. Ada pula yang mengatakan Ali lahir lima tahun sebelum kenabian. Ibn Ishak dan kebanyakan ahli sejarah mengatakan Ali lahir 10 tahun sebelum kenabian. Ali Audah mengatakan Ali lahir pada hari Jumat 13 Rajab tahun 600 Masehi.

Tahun ini dihitung berdasarkan catatan sejarah dengan jarak 30 tahun setelah kelahiran Rasulullah saw., yaitu tahun 570 Masehi. Semenjak masa bayi Ali diasuh oleh Nabi Muhammad saw sendiri,⁴⁶ karena Nabi dulunya juga diasuh oleh Abu Thalib, ayah Ali.⁴⁷ Nabi Muhammad saw ketika masih muda dan beliau juga membalas budi pamannya Abu Thalib dengan mengasuh Ali. Rasul sangat sayang kepadanya karena memiliki sifat yang mulia.⁴⁸ Sifat yang mulia itu memang sudah kelihatan pada diri Ali semenjak kecil karena bergaul dengan orang yang baik budi pula. Selain takdir Allah, keluarga dan lingkungan dapat berpengaruh kepada generasi yang ditinggalkannya dari segi fisik, bakat, keberanian, penampilan⁴⁹ dan sebagainya.

Seperti diketahui Ali adalah keturunan Bani Hasyim dari Suku Quraisy. Dalam sejarah, suku ini memiliki bahasa yang fasih dan cakap menjelaskan sesuatu secara gamblang. Selain itu mereka juga berakhlak mulia, memiliki sifat keberanian yang luar biasa dan masyarakat sudah mengenal sifat-sifat itu. Pada masa jahiliyah mereka berbeda masyarakat lain, hidup rukun dan banyak berpegang teguh kepada syari'at Nabi Ibrahim.⁵⁰ Mereka tidak sebagaimana orang-orang Arab lainnya ketika itu yang tidak dibimbing dan muliakan oleh agama, serta tidak dihiasi dengan akhlak.

Dalam pergaulan mereka sangat menyayangi anak, saling hormat menghormati, termasuk kepada jenazah, terbebas dari sifat buruk dan perilaku kenistaan. Mereka tidak melakukan pernikahan terlarang seperti dengan anak perempuan sendiri, saudara perempuan sendiri, cucu perempuan, menjaga

⁴² Ali Audah, *Ali bin Abi Thalib sampai kepada Hasan dan Husen*, (Bogor : Litera AntarNusa, Pustaka Nasional, 2010), h. 28.

⁴³ *Ibid.* h. 28.

⁴⁴ *Ibid.* h. 27.

⁴⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

⁴⁶ Alaidin Koto, M.A., *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada 2011), h. 70

⁴⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 29.

⁴⁸ Mahmudunnasir, *Islam, Konsepsi dan Sejarahnya*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1991), h. 194.

⁴⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Op.Cit.* h. 15.

⁵⁰ *Ibid.* h. 17.

kehormatan istri dan menjauhi perilaku orang Majusi. Dalam agama mereka sering melaksanakan haji ke Baitullah, mengerjakan amal ibadah. Mereka juga mengizinkan putra-putri mereka menikah dengan suku lain tanpa fanatik dan berpegang kepada ajaran-ajaran agama.⁵¹

Abdul Muthalib, kakek Ali sekaligus kakek Rasul pada masa Jahiliyah dikenal sebagai dermawan, memberi makan dan minum jamaah haji, pada hal dia bukan orang terkaya dan bukan satu-satunya tokoh yang disegani di kalangan suku Quraisy.⁵² Tugasnya itu ditambah dengan memelihara sumur Zamzam yang erat kaitannya dengan Baitullah telah meningkatkan derajat dan menambah kemuliaan bagi diri Abdul Muthalib.

Termasuk sikap yang menambah kemuliaan mereka pada saat itu adalah mereka mengizinkan terjadinya pernikahan kepada kabilah apa saja. Tanpa adanya syarat apapun dan sikap fanatik atas kabilah mereka. Mereka tidak menikahkan putra-putri mereka kecuali kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran-ajaran agama mereka. Ketentuan itu berlaku bagi mereka dan lebih-lebih bagi tokoh-tokoh mereka.

Kemuliaan ini juga diwarisi oleh Abu Thalib ayah Ali sendiri. Ia juga sangat disegani oleh suku Quraisy. Ia sangat menyayangi Nabi Muhammad memeliharanya semenjak kecil, dan membelanya mati-matian dari keinginan orang Quraisy yang membenci Nabi saw. Walaupun tidak sempat syahadat, Abu Thalib telah membela Nabi termasuk menyampaikan tugas dakwah Nabi.⁵³

Terkait atau tidak terkait dengan hal itu, selain mendapat bimbingan dari Nabi semenjak kecil, Ali juga mewarisi kemuliaan dan sikap-sikap baik dari nenek moyangnya. Kemuliaan itu semakin bertambah karena ia dibimbing oleh Nabi sendiri. Sinar al-Quran yang menjadi akhlak Nabi terpantulkan kepada diri Ali.⁵⁴ Meskipun masih sangat muda Ali selalu mendampingi Nabi dalam setiap kegiatan dakwah dan menjadi pejuang terkemuka di kalangan Islam. Dia merupakan seorang pemberani, menjadi prajurit agung, lihai dalam berperang dan terkenal dalam setiap pertempuran yang dilakukan umat Islam melawan orang-orang kafir dan orang-orang Yahudi.⁵⁵

Hidup Ali dari awal sudah mendapat cahaya Islam, dan ketika berumur 10 tahun ia menerima Islam tanpa ragu-ragu dan tanpa berunding dengan siapa pun, termasuk dengan ayahnya Abu Thalib sendiri. Ketika Nabi dan Khadijah shalat Ali datang. Ia tidak mengerti ketika melihat keduanya ruku dan sujud serta membaca beberapa ayat. Selesai shalat Ali bertanya

⁵¹ *Ibid.* h. 18.

⁵² *Ibid.*, h. 19.

⁵³ *Ibid.* h. 21.

⁵⁴ *Ibid.* h. 32.

⁵⁵ Mahmudunnasir, *Islam, Op.Cith.* 194.

kepada Nabi kepada siapa mereka sujud. Nabi menjelaskan bahwa mereka sujud kepada Allah yang mengajak manusia untuk menyembah-Nya.⁵⁶ Kemudian Nabi mengajak Ali untuk beribadah kepada Allah dan menerima agama Islam secara sempurna dengan kesadaran sendiri tanpa paksaan.

Baik karena keagungan dan keistimewaan suku Quraisy maupun dari bimbingan Nabi Muhammad saw Ali telah mewarisi berbagai sifat terbaik, seperti kefasihan berbahasa, memiliki akhlak yang luhur, pemberani, dermawan, rendah hati, menjauhi kesombongan, sangat memuliakan tamu, ramah, terlepas dari sikap dan perilaku jahiliah.

Walaupun berada di lingkungan Nabi, penulis perlu mengemukakan bagaimana proses Ali menjadi muslim. Keislaman Ali seolah-oleh sudah merupakan skenario Allah. Kisah itu berawal dari krisis perekonomian yang dialami masyarakat Quraisy. Abu Thalib memiliki banyak anak, tetapi penulis tidak menjumpai dari berbagai literatur berapa orang anak yang ia miliki. Krisis itu menyulitkan. Rasul berpikir bagaimana cara membantu pamannya ini untuk mengatasi kesulitan yang ia hadapi. Rasulullah berkata kepada Abbas pamannya yang dianggap lebih berkecukupan dari Bani Hasyim, kata Rasul, "Wahai Abbas, sesungguhnya saudaramu Abu Thalib memiliki keluarga yang besar. Kamu tahu krisis yang saat ini sedang melanda masyarakat, maka marilah kau berada bersama kami untuk meringankan beban mereka, saya akan mengambil satu orang dari anaknya dan kamu juga mengambil satu orang anaknya untuk kitaukupi segala kebutuhannya." Lalu Abbas berkata, Ya wahai Rasulullah, lalu keduanya berangkat menuju rumah Abu Thalib. Sampai di sana keduanya berkata, "Wahai Abu Thalib, sesungguhnya kami berniat untuk meringankan beban keluargamu." Berkatalah Abu Thalib kepada keduanya, "Jika kalian berkehendak, maka tinggalkanlah untuk kami anak kami yang bernama Ukail lali ambil siapa yang kalian kehendaki selain dia."⁵⁷

Kemudian Rasulullah mengambil Ali untuk hidup bersamanya, dan Abbas mengambil Ja'far untuk hidup bersamanya. Berawal dari situlah maka kemudian Ali hidup bersama Rasulullah hingga datangnya risalah kenabian. Selama itu, Ali selalu mendampingi, dan termasuk orang pertama dari golongan anak-anak yang mengakui dan mempercayainya. Begitu pula Ja'far juga tetap tinggal bersama Al-Abbas hingga dia masuk Islam dan hidup mandiri.⁵⁸

Dari sini ternyata Rasulullah telah membalas kebaikan yang dilakukan pamannya Abu Thalib kepada dirinya yang telah merawat dan mencukupi segala kebutuhannya pasca kematian kakeknya Abdul Muthalib. Ini merupakan jalan hadirnya nikmat Allah yang sangat besar kepada Ali karena dari sinilah kemudian Ali dirawat dan dididik oleh Rasulullah sesuai dengan

⁵⁶ Ali Audah *Op. Cit.* h. 28.

⁵⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op. Cit.* h. 31.

⁵⁸ *Ibid*, h. 31

petunjuk Allah. Kepribadian Rasulullah yang bersumber dari al-Qur'an terpantulkan kepada diri Ali. Ali tumbuh dan berkembang di dalam rumah Islam, dia tahu segala rahasia-rahasia Islam semenjak usia dini. Hal itu terjadi sebelum dakwah Islam mulai melangkah keluar dari rumah Nabi dan mencari pertolongan yang memperkuat dakwahnya kepada manusia, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Dengan kehendak-Nya, dengan Dia mengutus rasul-Nya. Saya ajak engkau wahai Ali untuk bersaksi terhadap Allah yang Maha Esa dan untuk menyembah-Nya. Dan agar engkau mengingkari Latta dan Uzza." Ali pun berkata kepada Nabi, "Ini adalah perkara yang aku belum pernah mendengarnya sama sekali sebelum hari ini, tetapi aku bukanlah orang yang memiliki keputusan atas perkaraku sehingga aku harus berbicara dulu kepada Abu Thalib." Namun Rasulullah tidak ingin Ali menceritakan rahasianya kepada siapa pun termasuk Abu Thalib sebelum dia diperintahkan oleh Allah untuk menceritakan urusan itu. Beliau pun berkata kepada Ali, "Wahai Ali jika engkau tidak berkenan masuk Islam maka jaga rahasia ini." Ali pun berdiam diri selama satu malam itu sehingga kemudian Allah memberi kepadanya hidayah Islam. Pada suatu pagi ia menghadap kepada Rasulullah dan berkata, "Apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Muhammad?" Rasulullah bersabda, "Kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan tidak menyekutukannya serta engkau mengingkari tuhan Latta dan Uzza, serta melepaskan diri dari segala bentuk penentangan kepada Allah." Ali pun melakukan apa yang diperintahkan Rasul kepadanya dan menyatakan diri masuk Islam.

Setelah itu, Ali sempat mengalami masa-masa khawatir dan takut kemarahan bapaknya Abu Thalib karena dia telah menganut agama Islam. Mula-mula dia menyembunyikan keislamannya itu, tidak berani menampakkannya.⁵⁹

Ibnu Ishaq menceritakan, setiap kali datang waktu shalat, Rasulullah keluar menuju tempat perbukitan di Makkah. Dan Ali bin Abi Thalib ikut bersama beliau secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Ia menyembunyikan keislamannya dari bapak, paman-paman, dan keluarganya yang lain. Keduanya mengerjakan shalat di tempat itu. Bila waktu petang tiba, keduanya baru bersiap-siap untuk pulang dengan sembunyi-sembunyi.

Pada suatu ketika Abu Thalib pun menemukan keduanya secara sembunyi-sembunyi sedang mengerjakan shalat. Lalu Abu Thalib bertanya kepada Rasulullah, "Wahai anak saudara laki-lakiku, agama apa yang sedang kalian anut ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah, agama para malaikat-Nya, agama para nabi-Nya, dan agama bapak kita Ibrahim." Saya telah diutus menjadi seorang Rasul kepada sekalian umat manusia. Dan engkau wahai paman, adalah orang yang lebih berhak untuk menerima

⁵⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi *Op. Cit.* h. 33.

nasehat dariku, mendapatkan dakwahku, memenuhi seruanmu, dan menolong diriku.”⁶⁰

Ajakan Rasulullah saw untuk mengucapkan syahadat tidak diterima Abu Thalib, tetapi bukan berarti ia marah kepada Rasul dan anaknya Ali. Sebenarnya Abu Thalib mengakui kebenaran ajaran Islam, tetapi pengaruh wibawa di kalangan kaumnya menghambat ia untuk menjadi muslim.⁶¹

Abu Thalib tidak melarang anaknya Ali untuk mengikuti agama yang dibawa Nabi Muhammad saw., bahkan mengizinkannya karena menurut Abu Thalib Muhammad tidak mengajak kecuali kepada kebaikan lalu menyuruhnya untuk selalu mengikuti Rasul.”⁶²

Sebagai muslim yang sangat kuat Ali tidak ragu untuk mengorbankan dirinya untuk memperjuangkan agama Islam. Pada malam hijrah, Rasulullah saw menugasinya untuk tidur di tempat tidur beliau. Ia ditugaskan Nabi untuk mengembalikan barang-barang kepada orang-orang musyrik pada pagi harinya. Ia pernah ditugaskan untuk membawa panji Rasulullah dalam berbagai peperangan. Rasulullah juga pernah mendelegasikannya untuk membacakan surat Al-Bara’ah di hadapan kaum muslimin pada musim haji tahun 9 H.⁶³

Ia memiliki 29 anak, 14 laki-laki dan 15 perempuan. Di antara anak laki-lakinya adalah Hasan dan Husein, pemuka pemuda surga, Muhammad ibn Al-Hanafiyah, Abbas, dan Umar.

B. Sistem Pemerintahan Ali Bin Abi Thalib

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Begitupun dengan jizyah atau pajak yang di ambil dari kaum non muslim yang bertempat di pemerintahan islam, khalifah Ali mengambil jizyah dari kaum non muslim yang bertempat tinggal di kawasan muslim sebagai jaminan keamanan bagi kaum non muslim, namun jizyah sendiri di ambil dengan bijaksana yakni bagi kaum non muslim yang tidak memiliki harta yang berlebih, maka jizyah tersebut di ambil semampunya

⁶⁰*Ibid.* h. 33

⁶¹*Ibid.* h. 33

⁶²Ali Muhammad Ash-Shalabi*Op.Cit.* h. 34.

⁶³Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Besar Islam Sepanjang Sejarah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 20

kaum non muslim membayarnya, namun kebalikan bagi kaum non muslim yang kaya raya. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel).

Dalam sikap *Egalitarian* (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukkan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut.

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.⁶⁴

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu'bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi atas pemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas mengingatkan bahwa Mu'awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Mu'awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Muawiyah, dia akan menikam mu mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut atas darah Usman.

Dalam masalah Talhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan usulan ini, sehingga Talhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang beruntai.⁶⁵

Meskipun demikian, menurut Nurcholish Majid, pemerintah Ali merupakan contoh komitmen yang kuat kepada keadilan sosial dan kerakyatan (populisme), di samping kesungguhan di bidang keilmuan.⁶⁶

C. Ide-ide Ali Bin Abi Thalib Tentang Pemerintahan

⁶⁴Nurcholish Majid, *Fiqih Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 88

⁶⁵*Ibid.* h. 89

⁶⁶Nurcholish Majid, *Islam, Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 1992), h. 165

Pasal ini membicarakan ide-ide dari Ali bin Abi Thalib. Di sini penulis mulai dengan menjelaskan sifat keadilannya. Penjelasan dikemukakan melalui suatu kisah. Suatu hari, Amirul mukminin melihat baju zirahnya, yang telah lama hilang, ternyata ada pada seorang Nasrani. Ia tidak tahu, bagaimana baju zirahnya itu bisa berada di tangan Nasrani itu. Ia berusaha meminta baju zirahnya dan menjelaskan bahwa baju zirah itu miliknya. Namun, Nasrani itu enggan memberikan dan bersikukuh bahwa itu baju miliknya. Akhirnya, Ali bin Abi Thalib membawa laki-laki itu ke pengadilan. Kadinya saat itu adalah Syarih. Kadi berkata kepada laki-laki Nasrani, "Apa pembelaanmu, atas apa yang dikatakan oleh Amirul Mukminin?"

Nasrani itu berkata, "Baju zirah ini milikmu. Amirul Mukminin tidak berhak menuduhku." Syarih berpaling kepada Ali dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apakah kau punya bukti?"

Di antara ide yang cukup menarik dari Ali bin Abi Thalib adalah bidang fikih. Ali bin Abi Thalib dianugrahi pemahaman yang baik terhadap kitab Allah dan sunnah Rasulullah saw. Ia merupakan salah satu poros fikih Islam, dan termasuk di antara kelompok utama pembuat fatwa di kalangan generasi muslim pertama.⁶⁷ Di sini penulis tidak akan menjelaskan ide fikihnya secara mendetail, tetapi hanya mengambil beberapa ide yang dianggap penting diketahui.

Di antara pendapat fikih yang sangat luas, kita mengenal pandangannya tentang nikah muth'ah. Ali bin Abi Thalib dielu-elukan oleh kaum Syi'ah sebagai imam yang ma'sum (terpelihara dari dosa dan kesalahan). Di kalangan Syi'ah terdapat hukum yang membolehkan terjadinya nikah muth'ah, yaitu nikah yang ditetapkan dalam jangka waktu tertentu. Sementara Ali tidak membolehkan nikah muth'ah.⁶⁸

Ali mengatakan bahwa jika dua orang menikah tanpa wali kemudian mereka bersetubuh maka keduanya tak dapat dipisahkan, sedangkan jika keduanya belum bersetubuh maka keduanya harus dipisahkan.⁶⁹ Ali bin Abi Thalib tidak membolehkan pernikahan orang yang dikebiri. Ia mengatakan, "Seorang laki-laki yang dikebiri tidak boleh menikahi muslimah yang menjaga kehormatan dirinya." Ali membolehkan umat Islam makan makanan kaum Majusi, kecuali daging. Ia juga mengharamkan makan daging sembelihan kaum Nasrani Arab karena mereka tidak memegang ajaran Nasrani yang benar, bahkan mereka suka minum arak. Pendapat Ali ini berbeda dengan pendapat jumhur ulama.⁷⁰

Ia juga berpendapat bahwa jizyah dari kaum musyrik dapat diterima kecuali kaum musrik Arab. Tentang hal ini ia mengatakan, "Tidak ada pilihan

⁶⁷Musthafa Murad, *Kisah Hidup Ali Ibn Abu Thalib*, (Jakarta: Zaman, 2013), h. 62.

⁶⁸Nurcholish Majid, *Op.Cit.* h. 400.

⁶⁹*Ibid.* h. 400

⁷⁰Nurcholish Majid, *Op.Cit.* h. 397.

bagi kita berkenaan dengan kaum musyrik Arab kecuali mereka masuk Islam atau perang.”⁷¹

Ia menyatukan antara hukuman cambuk dan hukuman rajam bagi *muhsan* yang berzina. Diriwayatkan dari al-Sya’bi bahwa Syarahah memiliki seorang suami yang sedang pergi ke Syiria, tetapi tiba-tiba ia mengandung sehingga majikannya membawanya ke hadapan Ali bin Abi Thalib dan berkata, “Wanita ini berzina dan ia mengakuinya.” Ali mencambuk wanita itu seratus kali pada hari Kamis dan pada hari Jumatnya ia dirajam. Aku menyaksikan sendiri tubuh wanita itu dikubur sebatas pinggang. Ali berkata ketika itu, “Rajam adalah salah satu sunnah Rasulullah Saw. Orang yang menjadi saksi perbuatan zina harus melempar pertama kali, namun karena wanita ini mengakui perbuatannya, maka akulah yang melempar pertama kali.” Lalu Ali melempar wanita itu dengan batu, dan diikuti oleh orang-orang yang ada di sana. “Demi Allah,” ungkap al-Sya’bi, “aku termasuk di antara orang yang melempar wanita itu menemui ajalnya.”

Dalam redaksi lain, Ali berkata, “Aku mencambuknya berdasarkan hukum Allah dan merajamnya berdasarkan sunnah Rasulullah saw.”

Ali mengharamkan permainan dadu dan catur, bahkan ia tidak mau mengucapkan salam kepada orang yang memiliki dadu. Ali juga menetapkan hukum mengenai perawan yang dipaksa menikah karena takut terjerumus dalam zina. Ia menetapkan *mahar mitsil* untuk wanita seperti itu dengan mengatakan bahwa mahar untuk perawan seperti mahar untuk wanita lainnya dan bagi janda mahar mitsilnya.

Dan ia membolehkan menerima hadiah dari penguasa (sultan), “Janganlah meminta sesuatu pun kepada penguasa. Jika ia memberimu, ambillah, karena dalam baitul mal lebih banyak harta yang halal ketimbang harta yang haram.

Ali melipatgandakan hukuman atas orang yang mendapat hukuman pada bulan Ramadhan. Diriwayatkan dari Atha, dari ayahnya bahwa Ali memukul seorang penyair negro dari Bani Harits, karena ia minum arak pada bulan Ramadhan. Orang itu dicambuk sebanyak delapan puluh dua cambukan. Setelah itu Ali berkata kepadanya, “Ali mencambukku lagi sebanyak dua puluh kali cambukan karena kau melakukan kejahatan kepada Allah dan karena kau berbuka di bulan Ramadhan.

Ide hukumnya yang lain adalah bahwa harta orang yang suka meminjamkan dan yang suka dititipi tidak dapat dijamin jika hartanya itu rusak tanpa memperhitungkan dari siapa ia mendapatkan hartanya.

Ia juga berpendapat bahwa orang yang menolong orang lain dalam kebenaran atau melindungi orang lain dari kezaliman tidak boleh menerima hadiah. Maksudnya, orang yang memiliki kekuasaan atau kewenangan untuk menjalankan urusan masyarakat tidak boleh menerima hadiah dari orang lain karena dianggap akan memengaruhi keputusan atau pendapat hukumnya. Itu beberapa pandangan Ali bin Abi Thalib seputar fikir Islam.

⁷¹Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Syarh Mukhtashar al-Khiraqi li Ibn Qudamah*, (Jakarta; Pustaka Azzam, Jilid 8), h. 738

Ali bin Abi Thalib memberikan julukan khusus kepada seorang fakih yang dihormati para fakih lainnya. Ia menyebutnya “*al-faqih haqq al-faqih*”. Ia berkata, “Maukah kalian kuberi tahu tentang yang paling utama di antara para faqih (*al-faqih haqq al-faqih*)? Ia adalah orang yang tidak memutuskan harapan manusia dari rahmat Allah, tidak mendorong mereka bermaksiat kepada Allah, tidak membuat mereka merasa aman dari makar Allah, dan ia tidak meniggalkan Al-Quran karena membencinya, lalu berpaling kepada yang lain. Ketahuilah, tidak ada kebaikan dalam ibadah yang tidak disertai pengetahuan, dan tidak ada kebaikan dalam pengetahuan yang tidak disertai pemahaman, dan tidak ada kebaikan dalam pembacaan yang tidak disertai tadabur (penelaahan).

Perhatiannya terhadap ilmu pengetahuan sama seperti Umar r.a. Dikisahkan bahwa Umar berkata, “pelajarilah pengetahuan dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah kemuliaan dan kehormatan diri. Bersikap rendah hatilah kepada orang yang mengajari dan yang kau ajari. Jangan menjadi ulama yang sewenang-sewenang, agar ilmumu tidak dikalahkan kebodohan.”⁷²

Selain dikenal luas sebagai seorang fakih, Ali bin Abi Thalib juga dikenal sebagai sahabat yang paling memahami kitab Allah. Ia banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran sehingga jika kita hendak menghimpun tafsir-tafsir Ali bin Abi Thalib, dibutuhkan berjilid-jilid besar. Di sini kami hanya akan mengungkapkan sebagian tafsirnya atas ayat-ayat Al-Quran yang mulai. Di antaranya, ia menafsirkan firman Allah: Wahai orang yang beriman, taatilah Allah dan RasulNya, dan penguasa urusan di antara kalian. Jika kalian berselisih tentang sesuatu maka kembalilah kepada Allah dan Rasul, dengan mengatakan bahwa mengembalikan kepada Allah berarti menjadikan kitab Allah sebagai landasan hukum, sedangkan mengembalikan kepada Rasulullah Saw. berarti memegang sunnah Rasulullah Saw. menafsirkan firman Allah: maka kami akan menghidupkannya dengan kehidupan yang baik, dengan mengatakan bahwa makna kehidupan yang baik adalah qanaah. Mengenai ayat sama saja baik berdiam di sana maupun di padang pasir, ia mengatakan bahwa al-*akif* adalah orang yang mukim, sedangkan al-*badi* adalah orang yang datang ke suatu tempat, dan bukan berasal dari tempat itu.⁷³

Ia juga mengatakan tentang ayat dan ketahuilah sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah, bahwa Allah menguji mereka dengan harta dan anak-anak sehingga menjadi jelas mana orang yang tidak rida atas rezeki dari-Nya dan orang yang rida dengan bagian dari-Nya. Meskipun Allah Swt. mengetahui keadaan mereka, Dia menjadikan harta dan anak-anak sebagai ujian untuk menunjukkan apakah seseorang layak mendapatkan pahala atau siksa. Sebab, ada di antara mereka yang lebih menyukai anak laki-laki dan membenci anak perempuan; sebagian mereka menyukai bertambahnya harta dan membencinya berkurangnya harta.

Mengenai ayat Al-Quran: sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada-Nya, Ali r.a menjelaskan bahwa ungkapan “kita berasal dari

⁷²Ibn Abdil Barr dalam *Jami' al-Ilm*, Jilid I, h. 135.

⁷³Musthafa Murad, *Op.Cit.* h. 66

Allah merupakan penegasan bahwa Dialah yang memiliki dan menguasai kita, sementara ungkapan “kita kembali kepada-Nya” merupakan penegasan bahwa Dialah yang akan membinasakan dan mematikan kita.

D. Sistem Pemilihan Khalifah Ali Bin Abi Thalib Pengaruhnya dalam Sistem Pemerintahan Islam

Pemilihan Ali sebagai Khalifah pada masa itu tidaklah semulus tiga orang Khalifah sebelumnya, dikarenakan pemilihan tersebut di tengah-tengah berkabung atas meninggalnya Khalifah Utsman, pada saat itu Ali menolak menjadi Khalifah, sebab Ali menghendaki urusan itu diselesaikan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, dan mendapat persetujuan dari para sahabat senior terkemuka, namun para kaum pemberontak maupun kaum Muhajirin dan Anshor tetap bersikukuh untuk menjadikan Ali sebagai Khalifah untuk menggantikan Khalifah Utsman. Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai seorang pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, dan akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah.

Ia dibai'at oleh mayoritas rakyat dari Muhajirin dan Anshor serta para tokoh sahabat, seperti Talhah dan Zubair, tetapi ada beberapa orang sahabat senior, seperti Abdullah bin Umar bin Khathab, Muhammad bin Maslamah, Saad bin Abi Waqqos, Hasan bin Tsabit, dan Abdullah bin Salam yang waktu itu berada di Madinah tidak mau membai'at Ali⁷⁴. Dengan demikian, Ali tidak dibai'at oleh kaum muslimin secara keseluruhan, karena banyak sahabat senior yang ketika itu tidak berada di kota Madinah. Salah seorang tokoh yang menolak untuk membai'at Ali dan menunjukkan sikap konfrontatif adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, keluarga Ustman dan gubernur Syam. Alasan yang dikemukakan mereka karena menurutnya Ali bertanggungjawab atas terbunuhnya Ustman.⁷⁵

Oleh karena tidak semua sahabat membai'at Ali, maka pemerintahan Islam pada masa Ali bin Abi Thalib dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang tidak setabil, karena adanya pemberontakan dari sekelompok kaum muslimin sendiri. Pemberontakan pertama datang dari Thalhah dan Zubair diikuti oleh Siti Aisyah yang kemudian terjadi perang Jamal. Setelah peperangan tersebut di selesaikan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib, lalu peperangan antar umat Islam terjadi kembali, yaitu antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah sebagai gubernur Suriah, sampai terjadi Tahkim dalam peperangan tersebut, dimana pasukan Muawiyah dengan sistem politik yang cerdik dan licik mengajak damai dengan pasukan Khalifah Ali. Karena diadakannya tahkim, secara tidak langsung pemerintahan Islam pada masa Khalifah Ali mengalami kekalahan dengan berkembangnya Muawiyah. Jumlah manusia, ekonomi dan sumber-sumber kekayaan Muawiyah jauh lebih kuat dibanding dengan Khalifah Ali. Semenjak kalahnya Khalifah Ali lalu disusul dengan wafatnya Khalifah Ali pemerintahan Islam di kendalikan oleh

⁷⁴ Dedi Supriyadi, M.Ag. Sejarah Peradaban Islam, (Bandung; Cv Pustaka Setia, 2016) h. 93

⁷⁵ *Ibid.* h. 94

Muawiyah, lalu dinasti muawiyah dibagi menjadi dua bagian yaitu *pertama*, dinasti Umayyah yang didirikan dan didirikan oleh Muawiyah Ibnu Abi Sufyan yang berpusat di Damaskus (Siria). Fase ini berlangsung sekitar satu abad dan mengubah sistem pemerintahan Islam, dari sistem Khilafah menjadi sistem kerajaan (monarki) dan *kedua*, dinasti Umayyah di Andalusia (Siberia) yang pada awalnya merupakan wilayah taklukan Umayyah di bawah pimpinan seorang gubernur pada zaman Walid Ibn Abdul Malik, kemudian sistem pemerintahan ini diubah menjadi sistem kerajaan yang terpisah dari kekuasaan Dinasti Bani Abbas setelah berhasil menaklukkan Dinasti Umayyah di Damaskus.⁷⁶



⁷⁶Dedi Supriyadi, *Op.Cit.* h. 95

BAB IV

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP SISTEM PEMERINTAHAN KHALIFAH ALI BIN ABI THALIB

A. Sistem Pemerintahan Pada Era Ali bin Abi Thalib

Dalam proses kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib boleh dibilang sangat tegas dan berani mengambil langkah-langkah yang cukup beresiko. Kepemimpinannya juga memang mencerminkan pribadi yang berakhlak dan berbudi pekerti. Beliau adalah orang yang suka berterus terang, tegas bertindak dan tidak suka berbasa-basi. Ia tidak takut kepada celaan siapapun dalam menjalankan kebenaran, meskipun hal itu cukup beresiko bagi dirinya. Hal tersebut dapat terlihat dari model pemerintahan yang dijalkannya, yaitu sebagai berikut:

1. Tipe Pemerintahan

- a. Tipe Demokrasi, Tipe demokrasi sebagai tipe kepemimpinan khalifah Ali bin Abi Thalib dalam pembai'atan Khalifah Ali Bin Abi Thalib sebagai Khalifah ke Empat setelah terbunuhnya Utsman Bin Affan. Khalifah Ali Bin Abi Thalib menerima bai'at di lakukan di Masjid Nabawi dan di depan masyarakat banyak termasuk kaum Mujahirin dan Anshar dan tidak ada penolakan, kecuali dari tujuh belas sampai dua puluh orang yang tidak meyetujui pembai'atan Khalifah Ali Bin Abi Thalib sebagai Khalifah.
- b. Tipe Karismatik, Tipe Karismatik sifat Khalifah Ali Bin Abi Thalib dalam memimpin masyarakatnya Ali selalu memperhatikan kinerja masyarakat. Dan disinilah khalifah Ali Bin Abi Thalib berusaha meneliti kebutuhan masyarakat, seperti dalam kehidupan sehari-hari maka khalifah Ali Bin Abi Thalib membuat saluran air untuk mengalir di lembah-lembah, seraya memperingatkan kepada pedagang agar mengetahui fiqih mu' amalah agar tidak terjatuh ke dalam riba.

- c. Tipe Militeristik, dalam pemerintahan Ali Bin Abi Thalib berusaha mengembalikan kebijakan dimasa Umar Bin Khattab. Membenahi dan meyusun arsip Negara bertujuan untuk mengamankan dokumen-dokumen Khalifah, membentuk kantor pembendaharaan, mendirikan kantor pasukan pengawal dan mendirikan lembaga hukum.

2. Strategi Pemerintahan

Strategi kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib mengembangkan dalam bidang Sosial, Politik, Militer dan Pengetahuan. Ali bin Abi Thalib mengambil langkah tegas diantaranya mencatat kepala-kepala daerah yang diangkat oleh Utsman dan dikirimkanlah kepala baru untuk menggantikannya, termasuk Muawiyah yang digantikan oleh Sabi" bin Junaif sebagai gubernur Syam. Demikian juga hibah atau pemberian Utsman kepada siapapun yang tidak beralasan diambil kembali oleh Ali untuk dikembalikan kepada Negara. Ali Bin Abi Thalib dalam menegakkan ke Khalifaan yakni: Mengganti Para Gubernur yang diangkat Khalifah Usman Ibnu Affan, Menarik kembali tanah milik Negara, Perkembangan di Bidang Politik Militer, Perkembangan di Bidang Ilmu Bahasa, Perkembangan di Bidang Pembangunan. Strategi Khalifah Ali Bin Abi Thalib ini untuk mengembangkan masa pemerintahannya di karenakan dalam pemerintahan Khalifah Ali Bin Abi Thalib ini banyak Selama pemerintahan Ali bin Abi Thalib berlangsung, tidak ada masa sedikit pun dalam masa pemerintahannya itu yang dapat dikatakan stabil. Ia menghadapi berbagai pergolakan dan konflik internal di kalangan umat Islam. Walaupun demikian, tidak berarti bahwa pada masanya tidak ada peradaban yang penting dan tidak dihasilkan.

3. Faktor yang mempengaruhi pemerintahan

Faktor yang sangat mempengaruhi kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib adalah. Kecerdasan yang terdapat pada Ali Bin Abi Thalib yang mana keistimewaan ini tak dimiliki sama sahabat-sahabat yang lain, ali yang di kenal sebagai zahid, menjauhi segala kesenangan duniawi, dan juga di sebut orang yang wara', yang menjauhi segala dosa dan syubhat, dan keistimewaanya kembali yakni ali diminta sebagai penasihat para khalifah sebelumnya Abu Bakar, Umar dan Utsman pandangnya sangat dalam dalam memutuskan perkara. Ali jga sangat lemah lembut terhadap siapapun, selalu

mengemukakan argumentasi yang kuat sehingga membuat lawan bicaranya menyerah dengan rasa puas, hidupnya sangat rendah hati, tak pernah merasa lebih tinggi.

4. Relevansi dalam Nilai-Nilai Pendidikan Agama

Nilai Pendidikan Islam dalam kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yakni: yang bisa kita ambil dari kepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib yaitu bertanggung jawab, berani, sederhana, dan adil. dikepemimpinan Khalifah Ali Bin Abi Thalib ini banyak pemberontakan dan tidak stabilnya pemerintahannya tetapi Khalifah Ali Bin Abi Thalib tetap memberikan Pendidikan walaupun tidak fokus dalam pendidikan Agama Islam di karenakan Pendidikan Agama Islam itu sangatlah penting, Pendidikan Agama Islam pada masa Khalifah Ali Bin Abi Thalib tidak jauh pada masa khalifah sebelumnya, yakni, mempelajari Al-qur'an dan tafsirnya, Hadits dan pengumpulannya, Fiqh (tasyri'). Selalu berupaya dalam menerapkan pendidikan Tauhid, akhlak, dan ibadah, karena pendidikan tersebut merupakan dasar ataupun pokok dari ajaran Agama Islam.

B. Sistem Pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam Perspektif Fiqih

Siyasah

Meskipun masa pemerintahan Ali yang selama enam tahun tidak sunyi dari pergolakan politik, Ali berusaha menciptakan sistem pemerintahan yang bersih, berwibawa, dan egaliter. Ali mengambil kembali harta yang dibagi-bagikan Usman kepada pejabat-pejabatnya, Ali juga mengirim surat kepada para gubernur dan pejabat daerah lainnya untuk bijaksana dan menjalankan tugasnya dan tidak mengecewakan rakyat. Ali pun menyusun undang-undang perpajakan. Dalam sebuah suratnya, Ali menegaskan bahwa pajak tidak boleh diambil tanpa memperhatikan pembangunan rakyat. Kepada pejabat daerah, Ali juga memerintahkan agar aib orang ditutupi dari pengetahuan orang lain. Untuk keamanan daerah, Ali juga menyebar mata-mata (intel).

Dalam sikap *Egalitarian* (persamaan derajat pada setiap manusia), Ali bahkan mencontohkan sosok seorang kepala negara yang berkedudukan sama dengan rakyat lainnya. Dalam sebuah kasus, Ali berperkara dengan seorang Yahudi mengenai baju besi. Yahudi tersebut, dengan berbagai argumen dan saksinya, mengklaim bahwa baju tersebut miliknya. Karena Ali tidak dapat menunjukan bukti-bukti dalam pembelaannya, maka hakim memutuskan memenangkan dan mengabulkan tuntutan Yahudi tersebut.

Ali ingin mengembalikan citra pemerintahan Islam sebagaimana pada masa Umar dan Abu Bakar sebelumnya, namun kondisi masyarakat yang kacau balau dan tidak terkendali lagi menjadikan usaha Ali tidak banyak berhasil. Umat lebih memperhatikan

kelompoknya daripada kesatuan dan persatuan. Akhirnya peraktis selama pemerintahannya, Ali lebih banyak mengurus persoalan pemberontakan di berbagai daerah.

Sebenarnya, dalam mengatasi berbagai persoalan yang melilit Ali, beberapa sahabat yang pernah memberikan masukan-masukan kepadanya, tetapi Ali menolak pendapat mereka dan terlalu yakin dengan pendiriannya. Dalam masalah pemecatan gubernur, misalnya, Mughirah ibn Syu'bah, Ibn Abbas dan Ziyad ibn Hanzalah menasihatkan Ali bahwa mereka tidak usah dipecat selama mereka menunjukkan kesetiaan kepada Ali. Pemecatan ini akan membawa implikasi yang tinggi atas pemberontakan mereka terhadap Ali, namun Ali tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Demikian juga dengan pemecatan Muawiyah. Sahabat Ibn Abbas mengingatkan bahwa Mu'awiyah adalah politisi ulung yang memiliki sifat lemah lembut terhadap rakyat. Apalagi Mu'awiyah telah berkuasa di Syam sejak kekhalifahan Umar. Ibn Abbas menasihatkan, jika engkau memecat Mu'awiyah, dia akan menikammu mengambil jabatan khalifah bukan dari musyawarah, tetapi dari pembunuhan Usman. Ini akan membuat rakyat Syam dan Irak yang telah digenggamnya datang akan menuntut atas darah Usman.

Dalam masalah Talhah dan Zubeir, Mughirah juga menasihatkan Ali agar menjadikan mereka berdua sebagai gubernur Kufah dan Basrah. Ali pun mengabaikan usulan ini, sehingga Talhah dan Zubeir kecewa dan berakhir dengan perang beruntun. Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegah kemudharatan. Seperti yang ada dalam pembahasan Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

T. M. Hasbi, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bagian yaitu:

1. Siyasah Tasyri'iyah (kebijakan tentang penetapan hukum)
2. Siyasah Dusturiyyah (kebijakan tentang peraturan perundang-undangan)
3. Siyasah Qadha'iyah (kebijaksanaan peradilan)
4. Siyasah Maliyyah (kebijaksanaan ekonomi dan moneter)
5. Siyasah Idariyyah (kebijaksanaan administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)

7. Siyasah Tanfidziyyah (politik pelaksanaan undang-undang)

8. Siyasah Harbiyyah (politik peperangan)

Bila dilihat dari beberapa uraian di atas, bahwasannya sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan sistem pemerintahan yang ada dalam ruang lingkup fiqih siyasah, yaitu salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, dimana Khalifah Ali tetap mengambil jizyah atas kaum non muslim yang berada di wilayah muslim akan tetapi jizyah tersebut tetap ada batasannya, dimana kaum nonmuslim yang kalangannya menengah ke atas, jizyahnya di ambil lebih besar, tetapi bagi kaum non muslim yang menengah kebawah jizyahnya di ambil sesuai dengan kemampuannya saja. Khalifah Ali tetap saja selalu mementingkan kemaslahatan umatnya walau dalam keadaan yang sangat hiruk-pikuk. Namun kebijakan-kebijakan nya tersebut di tentang oleh pendukung dan kerabatnya, bahwasannya kebijakan-kebijakannya tersebut terlalu radikal, walau demikian Khalifah Ali tetap dalam keputusan dan pendiriannya yang ingin mencapai cita-cita yang ada pada masa kekhalifahan Usman. Begitupun dengan kebijakan-kebijakan lain yang di jalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan di atas, penulis menyimpulkan bahwasannya

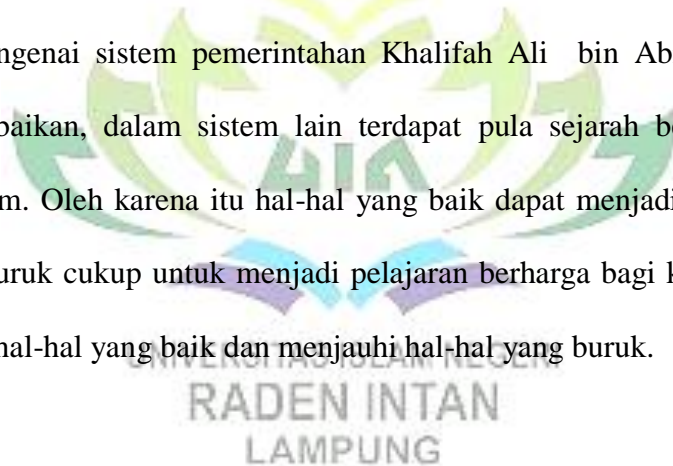
1. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib termasuk sistem pemerintahan yang terkenal tegas, bijaksana dan sangat mementingkan kemaslahatan umatnya. Sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib juga sangat berpegang teguh terhadap al-Qur'an dan as-Sunah. Kebijakan-kebijakan Khalifah Ali bin Abi Thalib yaitu: memecat kepala-kepala daerah yang diangkat usman dan digantikan oleh kepala daerah pada masa Ali, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Ustman kepada family-famili dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah, demikian juga hibah atau pemberian kepada siapapun yang tiada beralasan, memindahkan ibukota Madinah ke Kuffah dan mempungsikan kembali baitul mal atau zakat.
2. sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam perspektif fiqh siyasah salah satunya tentang kebijakan penetapan hukum, kebijakan peradilan dan politik peperangan, seperti peperangan yang terjadi dalam perang Siffin, sesungguhnya ali tidak ingin melakukan tahkim atau arbitrase, karena khalifah Ali sendiri telah mengetahui bahwasanya tahkim yang dilakukan muawiyah hanyalah politik untuk mengalahkan pasukan Ali, karena pasukan Muawiyah telah terpojok. Akan tetapi Khalifah Ali di paksa pasukannya sendiri untuk melakukan tahkim, dan mereka mengancam akan memberontak seperti yang dilakukannya terhadap Muawiyah. Dengan rasa terpaksa, Khalifah Ali menurut

keinginan pasukannya untuk melakukan tahkim tersebut. Begitupun dengan kebijaka-kebijakan lainnya yang di jalankan oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib.

Adapun lebih jelasnya sistem pemerintahan khalifah Ali bin Abi Thalib sangat mementingkan kemaslahatan umatnya dan mencegahnya kemudharatan, seperti yang di terangkan dalam Fiqih Siyasah yaitu suatu konsep yang berguna untuk mengatur hukum ketatanegaraan dalam bangsa dan Negara yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

3. Saran-saran

1. Pembahasan yang berkenaan dengan pemerintahan, terutama sistem pemerintahan Khulafa Rasyidin masih relative sedikit, maka kedepannya saya berharap teman-teman mahasiswa agar dapat memilih bagian-bagian seperti ini.
2. Kajian mengenai sistem pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib diwarnai banyak kebaikan, dalam sistem lain terdapat pula sejarah berawalnya prilaku politik Islam. Oleh karena itu hal-hal yang baik dapat menjadi teladan, dan hal-hal yang buruk cukup untuk menjadi pelajaran berharga bagi kita dan kita perlu mengikuti hal-hal yang baik dan menjauhi hal-hal yang buruk.



DAFTAR PUSTAKA

- A.Syalabi, Sejarah dan Kebudayaan Islam, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1982)
- Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007)
- Asghar Ali Engineer, Asal Usul dan Perkembangan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)
- Badriyatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: Raja Grafindo, 2003)
- Budhi Munawwar Rachman, Ensiklopedi Nur Cholish Majid, (Jakarta: Mizan, 2006)
- Djazuli, H.A. Fiqh Siyasah “Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah”, (Jakarta: Kencana, 2009)
- Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung : Pustaka Setia , 2008)
- Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1990)
- Dewi Masitoh, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Kartasura: CV Sindunata, 2008)
- Eri Rosatria, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta Pusat: DIRJEN Pendidikan Islam Departemen Agama RI, 2009)
- Hadariansyah, Pemikiran-Pemikiran Teologi Dalam Sejarah Pemikiran Islam, (Banjarmasin: Antasari Press, 2008)
- Hasan, As’ari, Menguak Sejarah Mencari Ibrah, (Bandung: Citapustaka Media, 2006)
- H.Bahroin Suryantara, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Bogor : Yudistira, 2011)
- Imam Fu’adi, Sejarah Peradaban Islam, (Yogyakarta: Teras, 2011)
- Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Alumni, Bandung 1989)
- Khairiyah, Reorientasi Wawasan Sejarah Islam, (Yogyakarta: Teras, 2012)
- Marshall GS Hudgson, The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Islam, Terj. Mulyadi Kartanegara, (Jakarta: Paramadina, 1999)
- Mas’udi, Masdar F. *Islam Agama Keadilan*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991)

- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1990)
- Nasution, Harun. *Teologi Islam; Aliran-aliran sejarah analisa perbandingan*. (Jakarta : Universitas Indonesia, 1986)
- Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Sou'yb Joesoef, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979)
- Sholikhin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Semarang: Rasail, 2005)
- Sutisno Hadi, *Metodologi Riset*, (YP Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta: 1985)
- Syeikh Muhammad Sa'id Mursi, *Tokoh-Tokoh Islam Sepanjang Sejarah*, Terj. Khoiril Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasaqh, Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007)
- Farid Abdul Khaliq, *Fiqh Politik Islam*, (Jakarta: Amzah, 2005)
- Nurcholish Madjid, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: kencana, 2014)
- Al-qur'an dan Terjemah
- Imam Nawawi, *terjemah Riyadhus Shalihin jilid I*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1999)